

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, F., *et al.* (2023). *Ilmu perundang-undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (hlm. 141). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J., *et al.* (2016). *Kamus istilah hukum*. Jakarta: Kencana.
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan (Penyelenggaraan masyarakat ketentraman, ketertiban umum dan manajemen kebencanaan)*. PT Nas Media Indonesia.
- Farida, M. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jenar, S. *et al.* (2024). *Hukum pemerintahan daerah*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Manan, B., & Magnar, K. (2017). *Beberapa masalah hukum tata negara*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ulfa, & Armin, R. A. (2024). *Buku ajar hukum pemerintahan daerah*. Eureka Media Aksara.
- Wirjosoegito, S. (2004). *Proses dan perencanaan peraturan perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal

- Chandra, Febrian. 2023. “Antropologi Hukum Dalam Masyarakat”. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (1):1-11.
<https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-16.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Fathorrahman. (2021). Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Hukum HUKMY*, 1(1), hlm. 73–90.
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam perspektif kebijakan deliberatif (*Policy analysis of street vendor arrangement from deliberative policy*). *Jurnal Governansi*, 6(2), hlm. 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), hlm. 56-65.
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan dan pengemis dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum: Analisis dampak dan

- solusi. *Jurnal Tatapamong*, Vol. 5.(2), 145–161.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- Paongan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2025). Analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatasi konflik regulasi di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4).
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20799>
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), hlm. 8–19.
- Rabu, & Azrianti, S. (2023). Kedudukan peraturan daerah sebagai lex specialis otonomi daerah dalam kearifan lokal. *PETITA*, Vol. 5 (2), hlm. 158–171.
- Rahmadanita, A. (2023). Tren penelitian ketertiban umum (public order): Sebuah pendekatan bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, Vol. 5, No. 1, hlm. 81–100.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>
- Rikardo, Ofis, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany. (2024). “Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Hukum SASANA* 10 (1): hlm. 162–179.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>

- Setyaningrum, W., Pandelaki, E. E., & Suprapti, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Pekalongan. *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur*, Vol. 18, No. 2, hlm. 160-162. DOI: [10.23917/sinektika.v18i2.15327](https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i2.15327)
- Sitinjak, D. L. H. (2025). Implementasi penegakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat Kota Manado. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 1136–1146.
- Sumardjono, M. S. W. (2017). *Hukum yang jelas dan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dan manfaatnya bagi bisnis perbankan dan properti* [Makalah]. Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik 37 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 15.

D. Skripsi, Tesis, Disertasi

Ismail, F. K. (2011). Kepastian hukum atas akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan. *Tesis magister, Universitas Indonesia, Depok.*

Maknun, Itsni Lu'lu'il. (2025). Penegakan Hukum Lokalisasi Makam Kembang Kuning Perspektif Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam 38 (Studi Kasus Satpol PP Surabaya). *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Pratama, Edo Pandu. (2024). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Keputran Surabaya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. *Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur.* hlm 1-155.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2025). Arti kata hierarki.

<https://kbbi.co.id/arti-kata/hierarki>. Diakses pada 3 Oktober 2025 Pukul 5.21 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2025). Arti kata kepastian.

<https://kbbi.web.id/pasti>. Diakses pada 3 Oktober 2025 Pukul 5.27 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2025). Arti kata

harmonisasi. <https://kbbi.web.id/harmonisasi>. Diakses pada 3 Oktober 2025 Pukul 6.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2025). Arti kata tertib.

<https://kbbi.web.id/tertib>. Diakses pada 8 Oktober 2025 Pukul 10.35 WIB.

F. Wawancara

Wawancara A. Pedagang Buah dan Tahu Petis. Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara A. Pedagang Buah Keliling. Surabaya. 5 Desember 2025.

Wawancara A. Pedagang Cilor dan Maklor. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara Bagus Tirta Prawita, S.H., Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 25 November 2025.

Wawancara Bagus Tirta Prawita, S.H., Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 6 Januari 2026.

Wawancara H. Pedagang Keripik Keliling. Surabaya. 5 Desember 2025.

Wawancara H. Pedagang Singkong Goreng. Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara Heri Setiawan, S.E., M.T., Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Pabean Cantian, 5 Desember 2025.

Wawancara J. Pedagang . Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara J. Pedagang Tahu Tek. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara J. Penjual Es Cao Susu. Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara K. Pedagang Kue Leker. Surabaya. 5 Desember 2025.

Wawancara M. Pedagang Aksesoris dan Alat Elektronik. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara M. Pedagang Cilok. Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara M. Pedagang Wonton. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara N. Pedagang Keripik Keliling. Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara N. Pedagang Sate dan Nasi Madura. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara S. Pedagang Pentol. Surabaya, 30 November 2025.

Wawancara S. Pedagang Siomay. Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara S. Pedagang Toko Kelontong. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara T. Pedagang Sempol. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara U. Pedagang Pentol. Surabaya. 29 November 2025.

Wawancara W. Pedagang Keripik Keliling. Surabaya. 30 November 2025.

Wawancara Y. Pedagang Bakso. Surabaya 30 November 2025.